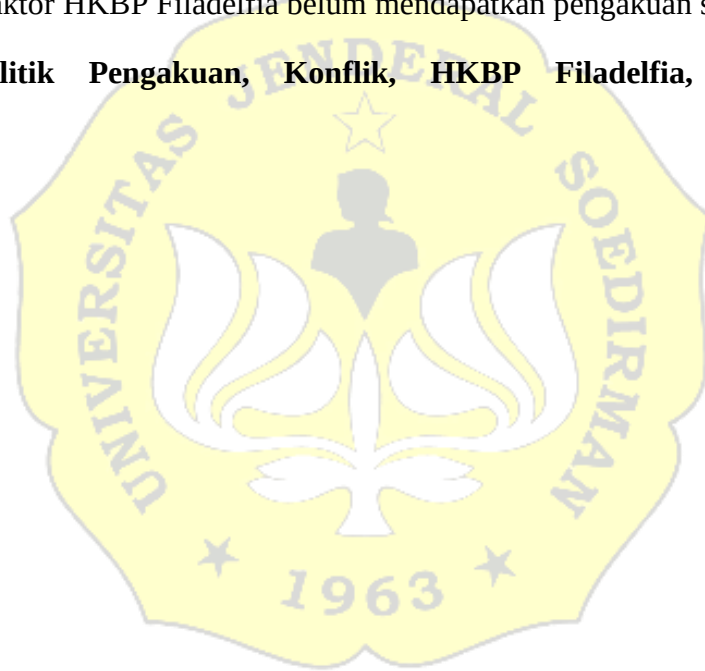


RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan jemaat HKBP Filadelfia dalam mendapatkan pengakuan untuk beribadah di lahan yang mereka miliki di Kabupaten Bekasi. Perjuangan dilakukan karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Menggunakan konsep politik pengakuan James Tully, penelitian ini menjabarkan perjuangan yang dilakukan HKBP Filadelfia dalam dua bentuk: (1) perjuangan atas praktik pengaturan sepihak, dengan mengajukan gugatan hukum dan melakukan peribadahan di depan lahan yang disegel dan di depan Istana Negara; (2) perjuangan dalam dialog antarkewargaan yang dilakukan dengan pemerintah, komisi negara, hingga warga Jejalenjaya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas legitimasi yang dimiliki nyatanya gagal dalam memberikan pengakuan, sehingga perjuangan jemaat HKBP Filadelfia terus berlanjut dan dinegosiasikan dengan berbagai strategi dalam sistem politik yang cenderung dipengaruhi oleh kelompok dominan. Penelitian ini memberikan temuan tentang dinamika politik pengakuan, bahwa kurangnya konsistensi tujuan karena pergantian pendeta menjadi salah satu faktor HKBP Filadelfia belum mendapatkan pengakuan secara utuh.

Kata Kunci: Politik Pengakuan, Konflik, HKBP Filadelfia, Dominasi, Dialog Antarkewargaan



SUMMARY

This study aims to analyze the struggle of the HKBP Filadelfia congregation to gain recognition to worship on land they own in Bekasi Regency. This struggle was carried out due to rejection from some of the surrounding community. Using James Tully's concept of the politics of recognition, this study describes the struggle undertaken by HKBP Filadelfia in two forms: (1) the struggle against unilateral regulatory practices, by filing lawsuits and holding worship services in front of the sealed land and in front of the State Palace; (2) the struggle in inter-citizen dialogue conducted with the government, state commissions, and residents of Jejlaljaya. Using a case study approach, this study found that the government, which should be responsible for the legitimacy they have, in fact, failed to grant recognition. Thus, the struggle of the HKBP Filadelfia congregation continues and is negotiated with various strategies within a political system that tends to be influenced by dominant groups. This study provides findings on the dynamics of the politics of recognition, that the lack of consistency of goals due to changes in pastors is one factor in HKBP Filadelfia not yet receiving full recognition.

Keywords: *Politics of Recognition, Conflict, HKBP Filadelfia, Domination, Intercitizen Dialogue*

